

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu negara salah satu hal yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakatnya, karena dari situlah terpancar keberhasilan suatu pemerintahan dalam memimpin negaranya. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih memfokuskan terhadap perekonomian rakyat.

Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. (data UMKM 2015, 2016, 2017)

Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95%

tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%.

Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.

Sehubungan dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan modal setelah pasca krisis dalam peningkatan UMKM ini diperlukan suatu Badan Usaha seperti Koperasi yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan usahanya. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi sokoguru dan wadah dalam perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia 2009 jumlah UMKM 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
 2010 jumlah UMKM 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%
 2011 jumlah UMKM 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
 2012 jumlah UMKM 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
 2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%

Maka diperkirakan dari 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Pada tahun 2017 perkembangan UMKM dan Koperasi tetap menjadi sorotan dan perhatian pemerintah hingga saat ini. Secara umum UMKM masih menghadapi permasalahan rendahnya kualitas SDM didalamnya seperti kurangnya keterampilan, kurangnya jiwa kewirausahaan maupun rendahnya pengetahuan mengenai teknologi. Namun meskipun demikian perkembangan UMKM tetap relatif baik dimana UMKM mampu bertahan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional.

Mengingat sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, maka ketersediaan modal adalah salah satu unsur yang sangat vital untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Akan tetapi akses UMKM yang terbatas terhadap kredit perbankan menghambat potensi kredit, sehingga tidak semua UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut dikarenakan anggapan pihak perbankan bahwa UMKM tidak *bankable* atau tidak layak diberikan kredit. Anggapan ini terjadi karena kurangnya informasi

mengenai UMKM yang potensial, tingginya suku bunga, biaya transaksi yang tinggi per nasabah, dan lemahnya UMKM dalam hal sumberdaya manusia, permodalan, teknologi, manajemen, dan pemasaran. Menurut Bank Indonesia (2010) sebanyak 60 juta UMKM di Indonesia belum tersentuh perbankan.

Melihat kondisi yang ada, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan. Nota Kesepahaman Bersama tersebut, ditandatangani oleh para pihak yang berwenang pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM.

Di kota Yogyakarta keberadaan koperasi sangat membantu terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan UMKM. Dari berbagai jenis koperasi yang ada, salah satu koperasi yang memberikan peranan sangat penting yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam cenderung bebas bagi semua orang yang memenuhi syarat yakni bagi yang mempunyai usaha baik itu dagang, manufaktur maupun jasa.

Koperasi yang ada di Yogyakarta kebanyakan memberikan bantuannya di desa-desa ataupun kampung-kampung yang ada di kota. Salah satu koperasi yang berbentuk demikian adalah “Koperasi Dian Mandiri Yogyakarta yang ada di

Nogotirto, Gamping, Sleman”.Koperasi Dian Mandiri adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang aktif dalam memberikan bantuan kredit kepada pengusaha UMKM.Selain itu, Koperasi Dian Mandiri memberikan pula pelatihan baik keterampilan maupun kemampuan mengelola keuangan (*Financial Literacy*) sehingga usahanya dapat mengalami peningkatan dan dapat berjalan lancar.

Koperasi Dian Mandiri hingga saat ini memiliki total aset sebesar Rp57 miliar. Rp53 miliar asetnya merupakan penyaluran kredit.Sekitar 90 persen dari nilai tersebut, disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan besaran mulai Rp500 ribu hingga Rp50 juta.Hal ini dikarenakan Koperasi Dian Mandiri benar-benar ingin menjadi koperasi yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya melalui penyaluran kredit yang diberikan kepada UMKM.

Penyaluran kredit yang dilakukan Koperasi Dian Mandiri kepada UMKM anggotanya selama ini berlangsung sesuai dengan pengajuan dari para anggota.Koperasi Dian Mandiri berusaha mencairkan setiap kredit yang diajukan anggotanya tanpa memilih usaha mana yang lebih menguntungkan untuk diberikan kredit, baik menguntungkan bagi UMKM pemohon kredit maupun Koperasi Dian Mandiri sbbagai penyalur kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit yang biasanya dijadikan acuan bagi tiap pihak yang akan memberikan kredit adalah usia pemohon, tingkat pendapatan, jenis usaha, lokasi usaha, lama usaha dijalankan, dan sebagainya, tidak semuanya diperhatikan dan diteliti secara rinci oleh Koperasi Dian Mandiri.

Koperasi Dian Mandiri Yogyakarta telah banyak menyalurkan kredit kepada UMKM sejak berdirinya pada tahun 2010. Tentu hal ini berdampak baik kepada Koperasi Dian Mandiri. UMKM anggota Koperasi Dian Mandiri yang mendapatkan bantuan kredit pun mampu mengembangkan usahanya, sehingga hal ini bisa dijadikan pertimbangan bagi UMKM atau masyarakat yang belum menjadi anggota Koperasi Dian Mandiri untuk bergabung menjadi anggota guna meningkatkan kesejahteraan.

Keberadaan koperasi ini sangat membantu UMKM yang ada di desa maupun kampung, terutama bagi UMKM yang tidak memenuhi syarat pinjaman di Bank. Oleh karena latar belakang tersebut maka penulis memilih judul penelitian : **Peranan Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Yogyakarta (Studi Kasus : Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri Yogyakarta)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem penyaluran kredit yang diterapkan Koperasi Dian Mandiri kepada UMKM di Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah pendapatan yang diperoleh UMKM dengan adanya penyaluran kredit yang dilakukan oleh Koperasi Dian Mandiri ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Dian Mandiri cabang Yogyakarta.UMKM anggota Koperasi Dian Mandiri adalah unit yang akan dianalisis pendapatannya sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit, dengan pertimbangan Koperasi Dian Mandiri banyak menyalurkan kredit pada anggotanya. Evaluasi mengenai peranan Koperasi Dian Mandiri dalam perkembangan UMKM khususnya di Yogyakarta adalah dengan menganalisis seberapa besar perubahan pendapatan anggota Koperasi Dian Mandiri setelah mendapatkan bantuan kredit.Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan terhitung dari bulan April hingga Juni 2017.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sistem penyaluran kredit yang diterapkan Koperasi Dian Mandiri kepada UMKM di Yogyakarta.
2. Menganalisis pendapatan yang diperoleh UMKM dari penyaluran kredit yang dilakukan Koperasi Dian Mandiri.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak Koperasi Dian Mandiri mengenai peranan koperasi dalam pengembangan UMKM dengan bantuan penyaluran kredit yang dilakukan.
2. Memberikan masukan, baik kepada pihak perbankan, koperasi, dan UMKM untuk mengembangkan UMKM sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.